

Available online at: <https://journal.utu.ac.id/index.php/jstcd>

Journal of Social Transformation and Community Development

| ISSN (Online) ----- |

Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pendidikan Politik Di Aceh

Andi Sayumitra dan Afrizal Tjoetra

Prodi Sosiologi Program Magister Universitas Teuku Umar

ARTICLE INFORMATION

Received: February 05, 2026
 Revised: March 05, 2026
 Accepted: April 13, 2026
 Available online: April 13, 2026

KEYWORDS

Organisasi Masyarakat Sipil, Masyarakat,
 Partisipasi Publik, dan Pendidikan Politik.

CORRESPONDENCE

Name: Andi Sayumitra Et al
 E-mail: andisayumitra@gmail.com

A B S T R A C T

Kesadaran politik serta partisipasi aktif masyarakat Aceh dalam proses demokrasi masih tergolong rendah. Walaupun Aceh dikenal sebagai daerah dengan dinamika politik lokal yang tinggi dan memiliki status otonomi khusus. Kondisi ini menimbulkan paradoks antara semangat demokratis yang dijamin dalam kerangka self-government Aceh dengan praktik politik yang masih bersifat elitis dan transaksional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis Organisasi Masyarakat Sipil dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat Aceh serta kontribusinya terhadap konsolidasi demokrasi lokal berbasis nilai Islam dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang diperkaya analisis kontekstual terhadap dinamika sosial dan politik Aceh. Data diperoleh dari buku, jurnal, laporan, dokumen kebijakan publik, serta hasil riset lembaga pemantau pemilu dan data statistik (2020–2024). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan teori masyarakat sipil dan partisipasi politik untuk memahami bagaimana Organisasi Masyarakat Sipil berfungsi sebagai agen pendidikan politik dan demokratisasi di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh seperti MaTA, GeRAK Aceh, Flower Aceh, dan Balai Syura Ureung Inong Aceh berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mendorong partisipasi publik, memperjuangkan kelompok rentan, serta mengawasi kebijakan dan aktif dalam proses pemilu. Agenda advokasi dan pendidikan politik yang dilakukan telah membentuk masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Organisasi Masyarakat Sipil bukan sekadar pelengkap demokrasi, tetapi fondasi utama dalam membangun masyarakat partisipatif dan berkeadaban. Penguatan kapasitas kelembagaan serta sinergi dengan institusi negara menjadi kunci terwujudnya demokrasi lokal yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Aceh.

INTRODUCTION

Hakikat demokrasi tidak terletak semata pada pelaksanaan pemilu, melainkan pada seberapa besar ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara sadar dan bermakna dalam kehidupan politik. Dalam konteks tersebut, masyarakat bukan lagi penonton pasif, tetapi menjadi pelaku utama dalam menentukan arah kebijakan publik. Peran strategis untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi ini banyak dijalankan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai wadah pembelajaran dan penguatan kapasitas politik warga. Namun, tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Indonesia pada umumnya masih fluktuatif dan sering kali bersifat pragmatis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai sarana pembentukan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab secara politik.

Dalam konteks Aceh, peran OMS menjadi semakin penting mengingat karakter sosial dan politik daerah ini yang unik. Sebagai daerah dengan status otonomi khusus dan sejarah panjang konflik politik, Aceh menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun demokrasi yang partisipatif dan inklusif. Di satu sisi, nilai-nilai Islam dan adat Aceh menjadi landasan moral dan etika politik yang kuat; namun di sisi lain, budaya patronase, feodalisme, dan dominasi elite lokal sering kali menghambat tumbuhnya kesadaran politik yang

kritis di tingkat akar rumput. Situasi ini menciptakan paradoks: Aceh memiliki ruang demokrasi yang luas secara formal, tetapi partisipasi politik masyarakat masih terbatas pada momen elektoral dan belum menyentuh dimensi substantif demokrasi. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) hadir sebagai aktor non-negara yang memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. OMS di Aceh, seperti MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh), Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), GeRAK Aceh, dan Flower Aceh, secara aktif terlibat dalam pendidikan politik, advokasi kebijakan publik, serta pengawasan pemilu. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran politik warga, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan lokal.

Meskipun demikian, efektivitas OMS di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya dukungan kelembagaan, keterbatasan sumber daya, resistensi politik dari kalangan elite, serta kuatnya budaya paternalistik sering kali menghambat peran OMS dalam memperluas ruang partisipasi masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang kegiatan politik sebagai urusan elite, bukan sebagai tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan publik. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana OMS berperan dalam memperkuat pendidikan politik dan sejauh mana kontribusinya terhadap konsolidasi demokrasi lokal di Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis OMS dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat Aceh, mengidentifikasi bentuk kegiatan dan pendekatan yang digunakan, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam konteks sosial, budaya, dan politik lokal. Dengan mengaitkan analisisnya pada teori masyarakat sipil (*civil society theory*) dan teori partisipasi politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan demokrasi berbasis nilai-nilai lokal di Aceh.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang diperkaya dengan analisis kontekstual masyarakat Aceh. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika sosial-politik, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi peran OMS dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat di Aceh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, laporan, dokumen kebijakan publik, serta hasil riset lembaga pemantau pemilu dan data statistik (2020–2024). Seluruh data tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana OMS berperan sebagai agen demokratisasi di tengah struktur sosial Aceh yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patronase, nilai-nilai religius, dan pola kepemimpinan tradisional.

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan teori masyarakat sipil (*civil society theory*) dengan teori partisipasi politik dalam konteks lokal Aceh. Pendekatan ini memungkinkan penulis menafsirkan bagaimana OMS membangun kesadaran politik warga melalui jaringan sosial, pendidikan pemilih, dan advokasi kebijakan publik, serta bagaimana peran tersebut berkontribusi terhadap konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menjelaskan fenomena peran OMS secara konseptual, tetapi juga menafsirkan relevansinya terhadap praktik politik masyarakat Aceh yang dinamis, religius, dan partisipatif.

RESULTS AND DISCUSSION

Keberadaan OMS dalam Pendidikan Politik di Aceh

Dalam sistem demokrasi, masyarakat berperan sebagai subjek utama dalam menentukan arah kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kesadaran politik dan partisipasi kritis warga tidak akan tumbuh secara alami tanpa adanya proses pendidikan politik yang berkelanjutan dan kontekstual. Di sinilah peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menjadi sangat strategis, terutama di Aceh daerah yang memiliki kekhususan politik dan sosial akibat sejarah panjang konflik, penerapan Syariat Islam, serta dinamika politik lokal yang kompleks. OMS di Aceh hadir sebagai wadah independen yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah, sekaligus menjadi ruang pembelajaran politik bagi warga. Melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan pemberdayaan, OMS membantu masyarakat memahami hak serta kewajiban politiknya dalam bingkai nilai-nilai Islam dan adat Aceh (*adat bak Po Teumeureuhom*, *hukom bak*

Syiah Kuala). Dengan demikian, keberadaan OMS bukan hanya pelengkap demokrasi lokal, melainkan juga pilar penting dalam membangun masyarakat Aceh yang sadar politik, beretika, dan partisipatif.

1. Meningkatkan Kesadaran Politik

Salah satu peran fundamental OMS di Aceh adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat yang selama ini masih dipengaruhi oleh budaya patronase dan dominasi elite lokal. Melalui diskusi publik, penyuluhan politik berbasis gampong, serta pelatihan kader muda, OMS membantu masyarakat memahami hak-hak politik, fungsi lembaga pemerintahan, dan mekanisme partisipasi publik. Kegiatan seperti yang dilakukan oleh Flower Aceh, Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), dan MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh) misalnya, menunjukkan bagaimana pendidikan politik dapat dikemas melalui pendekatan nilai Islam, kearifan lokal, dan isu-isu sosial kemasyarakatan. Peningkatan kesadaran politik ini menjadi langkah awal membangun masyarakat yang kritis terhadap kebijakan publik dan berani menolak praktik politik uang atau penyalahgunaan kekuasaan.

2. Mendorong Partisipasi Politik

Selain meningkatkan kesadaran, OMS di Aceh juga berperan aktif dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan wilayah pascakonflik. Melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan perempuan, forum warga, serta musyawarah publik, OMS mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga pelaku yang aktif dalam proses politik. Misalnya, sejumlah OMS seperti Forum LSM Aceh, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), serta Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) memfasilitasi pelibatan warga dalam perumusan kebijakan publik, advokasi anggaran desa, dan pemantauan proses pemilu. Upaya ini menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat praktik demokrasi partisipatif di tingkat akar rumput (meuseuraya politik).

3. Melakukan Pendidikan Pemilih

Menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, OMS di Aceh rutin menggelar pendidikan pemilih (voter education) untuk memastikan warga memahami proses demokrasi secara benar dan etis. Program seperti Sekolah Demokrasi Aceh Barat dan Kelas Pemilih Cerdas yang digagas oleh beberapa OMS lokal menjadi contoh bagaimana pendidikan politik dikemas secara kontekstual dan bernilai budaya. Melalui kegiatan sosialisasi, simulasi pemungutan suara, dan diskusi isu kebijakan, OMS membantu masyarakat memahami pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak dan visi kandidat, bukan karena uang atau tekanan sosial. Pendekatan ini juga berupaya menekan praktik politik uang (money politics) dan serangan fajar yang kerap terjadi dalam politik lokal Aceh. Dengan demikian, OMS berperan menjaga integritas pemilu serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

4. Memberikan Ruang Suara bagi Kelompok Rentan

Dalam masyarakat Aceh yang masih cenderung patriarkal dan religius, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sering kali terpinggirkan dari ruang politik. OMS berperan penting sebagai jembatan bagi kelompok-kelompok ini agar memiliki akses dan representasi politik yang setara. Misalnya, Balai Syura Ureung Inong Aceh secara konsisten memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam politik lokal melalui pendidikan kader dan advokasi kebijakan afirmatif. OMS lain seperti Forum Peduli Disabilitas Aceh mengedukasi publik tentang hak politik penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilu dan proses kebijakan publik. Peran ini menjadikan OMS sebagai penggerak inklusi politik, memastikan bahwa demokrasi Aceh tidak hanya menjadi milik elite, tetapi juga milik seluruh lapisan masyarakat.

5. Mengawasi Kebijakan Publik

Selain menjalankan pendidikan politik, OMS di Aceh juga berfungsi sebagai pengawas independen terhadap kebijakan publik dan pelaksanaan pemerintahan. Dengan kapasitas analisis dan jaringan sosial yang luas, OMS seperti MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh), GeRAK Aceh, dan Koalisi NGO HAM Aceh aktif melakukan pemantauan anggaran, audit sosial, dan advokasi kebijakan publik. Fungsi pengawasan ini menjadi elemen penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi di tingkat daerah. Melalui publikasi laporan dan kampanye transparansi, OMS menekan pemerintah daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan OMS menjadi bagian dari sistem check and balance dalam pemerintahan Aceh, sekaligus memperkuat prinsip good governance yang berkeadilan sosial.

OMS sebagai Fasilitator Pendidikan Politik dan Demokrasi Lokal

Dalam menjalankan fungsinya, OMS di Aceh tidak hanya menjadi aktor pendidikan politik, tetapi juga fasilitator demokrasi lokal. Kegiatan seperti advokasi kebijakan, pengawasan pemilu, pelatihan politik warga, dan kampanye sosial menjadi instrumen utama dalam membangun budaya politik yang sehat dan berkeadaban. Melalui advokasi, OMS mendorong pemerintah dan partai politik agar lebih berpihak pada kepentingan publik, misalnya dengan menuntut transparansi dana kampanye, mendorong peraturan daerah yang pro-lingkungan, dan memperjuangkan keterwakilan perempuan di legislatif. Dalam pengawasan pemilu, OMS memastikan proses berjalan jujur, adil, dan bebas dari manipulasi suara. Sementara itu, melalui kegiatan pelatihan politik berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, OMS membantu masyarakat memahami demokrasi sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yaitu partisipasi politik yang beretika, berkeadilan, dan bermoral. Dengan demikian, OMS di Aceh berperan ganda, yaitu sebagai pendidik politik warga dan penjaga moral demokrasi lokal. Peran ini menjadi fondasi penting bagi terbangunnya masyarakat Aceh yang partisipatif, inklusif, dan sadar akan tanggung jawab politiknya dalam mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan.

CONCLUSION

A collaborative governance approach has emerged as a potential solution to the complex problems in the Maninjau Lake area. Through four stages of collaborative governance, face to face dialogue method shows a clear indication of stakeholders' collaboration. Agam Regency Government as the role actor presents more involvement than PT. PLN and PT. Semen Padang, and local society around Maninjau Lake. Save Maninjau Lake is one of the few programs that have been implemented as an initiative solution to maintain lake sustainability. Laws and regulations also support environmental protection and management efforts to preserve the lake's environment. However, these efforts still need to be improved and maintained comprehensively. Stakeholders must commit to working together in the long term, following the principles of collaborative governance, and continuing to monitor developments in the lake environment. In lake management, environmental and economic issues are commissioned by governance approaches and legislation improvement issues

OMS di Aceh memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi lokal. Di tengah dinamika politik yang dipengaruhi budaya patronase, struktur sosial patriarkal, dan nilai-nilai religius, OMS tampil sebagai agen perubahan yang menjembatani kepentingan rakyat dengan pemerintah. Melalui pendidikan pemilih, advokasi kebijakan, pelatihan kader, dan pengawasan pemilu, OMS berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran politik dan memperluas partisipasi warga dalam proses demokrasi. Sebagai fasilitator demokrasi lokal, OMS tidak hanya memperkuat literasi politik, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab warga negara. Pendekatan berbasis nilai Islam dan kearifan lokal menjadikan partisipasi politik dipahami sebagai tanggung jawab moral bersama. Meski menghadapi kendala seperti keterbatasan kelembagaan dan resistensi elite politik, OMS tetap menjadi pilar penting dalam menjaga integritas demokrasi Aceh. Dengan demikian, OMS bukan sekadar pelengkap demokrasi, melainkan fondasi utama dalam membangun masyarakat Aceh yang partisipatif, inklusif, dan

berkeadaban politik. Penguatan kapasitas OMS, sinergi dengan lembaga negara, dan dukungan publik menjadi kunci untuk memperkuat peran OMS sebagai penggerak demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Aceh.

REFERENCES

- Aspinall, E. (2009). *Islam and nation: Separatist rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford University Press.
- Balai Syura Ureung Inong Aceh. (2020). *Laporan tahunan program pemberdayaan perempuan dan partisipasi politik di Aceh*. Banda Aceh: BSUIA.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Wiley.
- GeRAK Aceh. (2022). *Laporan pemantauan transparansi anggaran dan partisipasi publik di Aceh Barat*. Banda Aceh: GeRAK.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. New York: International Publishers.
- KIP Aceh. (2020). *Data statistik partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2019 dan Pilkada Aceh 2017*. Banda Aceh: Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh). (2021). *Laporan pengawasan pemilu dan akuntabilitas publik di Provinsi Aceh*. Banda Aceh: MaTA.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Salman, A., & Haryanto, J. T. (2016). *Demokrasi dan civil society di Indonesia: Dinamika gerakan sosial dan partisipasi politik warga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjoetra, Afrizal dan Kamarulzaman Askandar (2014). *Peran OMS dalam Pembangunan Perdamaian Aceh*. Jurnal Pasai, LPPM Universitas Malikussaleh. Vol. 8 No.1, Mei 2014. ISSN:1979-1755.
- Tjoetra, A. (2018). *Transformasi Organisasi Masyarakat Sipil Aceh Pasca MoU Helsinki*. Community: Pengawas Dinamika Sosial ISSN 2477-5746 (cetak); ISSN 2502-0544 (online)
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. New York: Harper & Row.
- Zuhri, S. (2021). *Peran organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat partisipasi politik di daerah otonomi khusus Aceh*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 13(2), 101-118.

